

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan, hasil temuan penelitian ini juga menjawab hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa alokasi belanja modal oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh kinerja keuangan dan *fiscal stress*. Adapun pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk tidak memiliki pengaruh. Kesimpulan lebih detail dapat dijabarkan sebagai berikut

1. Provinsi Sumatera Barat dalam alokasi belanja modalnya pada periode 2019-2023 dipengaruhi oleh rasio kemandirian. Menurut hasil penelitian, tingginya tingkat kemandirian keuangan daerah dapat mengindikasikan bahwa daerah tersebut tidak terlalu bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa daerah dapat mendanai belanja daerahnya, khususnya belanja modal, dengan pendapatan daerahnya sendiri.
2. Pada Provinsi Sumatera Barat, alokasi belanja modal dari pemerintah kabupaten dan kota untuk periode 2019–2023 dipengaruhi oleh rasio efektivitas. Berdasarkan temuan tersebut, daerah dengan rasio efektivitas yang tinggi mampu mencapai realisasi PAD sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini memiliki pengaruh terhadap belanja modal bahwa daerah dengan realisasi pencapaian PAD yang efektif memiliki kemampuan untuk menunjang berbagai alokasi belanja daerah (seperti belanja modal) melalui penerimaan asli daerah.

3. Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2023. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dampak yang besar terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat belum mampu menunjang secara maksimal pendapatan daerah yang pada alokasinya akan dipergunakan untuk belanja modal daerah. Tujuannya untuk menyediakan infrastruktur yang dapat meningkatkan pelayanan dan kegiatan perekonomian masyarakat.
4. Dalam alokasi belanja modal kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2023 dipengaruhi oleh *fiscal stress*. Ketika pemerintah daerah mengalami tekanan anggaran (*fiscal stress*) akibat pendapatan asli daerah yang terbatas sehingga ketika pemerintah perlu mengalokasikan pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja. Pada pemerintah daerah, belanja paling banyak dikeluarkan adalah belanja yang sifatnya operasional. Sehingga pendapatan daerah yang dialokasikan untuk belanja modal berkurang karena daerah harus menutupi kebutuhan belanja operasionalnya terlebih dahulu.
5. Kepadatan penduduk tidak mempengaruhi pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat dalam alokasi belanja modal Periode 2019-2023. Pada provinsi Sumatera Barat kepadatan penduduk masih memusat pada kota-kota besar sehingga alokasi belanja modal untuk ketersediaan infrastruktur atau sarana prasarana bagi pelayanan masih terpusat pada kota-

kota besar. Belum meratanya persebaran penduduk sehingga alokasi belanja modal untuk menunjang sarana prasarana bagi masyarakat dengan pertimbangan tersebut belum menjadi alasan bagi mayoritas pemerintah daerah untuk menjadi pertimbangan alokasi belanja modal di daerahnya. Hal ini juga dapat diambil kesimpulan bahwa, infrastruktur yang tersedia selama lima tahun kebelakang masih dapat menunjang bagi kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah tidak begitu mengalokasikan kebutuhan belanja modal secara lebih untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

6. Alokasi belanja modal dapat dipengaruhi secara bersama-sama oleh kinerja keuangan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, *fiscal stress*, dan kepadatan penduduk . Hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan atau secara bersama-sama faktor-faktor ini dapat mempengaruhi alokasi belanja modal. Ini memberikan kesimpulan bahwa tidak hanya faktor keuangan saja, tetapi faktor non keuangan seperti kepadatan penduduk dapat menjadi penilaian bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modalnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, *fiscal stress*, dan kepadatan penduduk semuanya dapat berpengaruh pada alokasi belanja modal secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor ini dapat memengaruhi bagaimana belanja modal dialokasikan jika dilihat secara simultan. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa pemerintah daerah mungkin menggunakan pertimbangan non moneter seperti kepadatan penduduk selain pertimbangan moneter untuk menentukan cara terbaik mengalokasikan belanja modal.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini dapat diberikan saran berikut ini:

1. Teruntuk Pemda Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat

Studi penelitian diharapkan bisa menghasilkan temuan yang menjadi saran, pertimbangan, ataupun masukan bagi pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat baik secara spesifik untuk alokasi belanja modal ataupun dalam perencanaan anggaran pemerintah daerah. Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Menurut teori keagenan, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat merupakan pihak yang dalam hal ini disebut sebagai agen mendapat mandat dari masyarakat sebagai prinsipal. Maka sudah seharusnya pemerintah daerah untuk selalu meningkatkan kinerja keuangannya demi memberikan layanan dan kewajibannya kepada masyarakat daerah. Terutama berkaitan dengan belanja modal sebagai belanja yang dikeluarkan untuk ketersediaan asset berupa sarana dan prasarana, maka tentu dengan memiliki kinerja keuangan daerah yang baik, mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah bisa memaksimalkan kewajibannya bagi masyarakat.
- b. Pemerintah kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Barat harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat menjamin pemenuhan kesejahteraan masyarakat juga. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki kaitan yang erat dengan belanja modal. Belanja modal yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai dapat diharapkan untuk

meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat menunjang kegiatan ekonomi, sehingga ekonomi daerah dapat bertumbuh. Apabila daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, ini juga mengindikasikan bahwa daerah memiliki kemampuan ekonomi yang kuat dalam menunjang daerahnya.

- c. Pemerintah kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Barat perlu untuk dapat meningkatkan potensi pendapatan daerahnya. Sehingga daerah tidak terlalu bergantung lagi dengan alokasi dana yang didapatkan dari pemerintah pusat. Hal ini berkaitan dengan kondisi *fiscal stress* atau tekanan anggaran dimana daerah dituntut untuk menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana yang layak bagi masyarakat di daerahnya, namun pendapatan daerah masih belum bisa memenuhi semua sarana dan prasarana ini, sehingga daerah masih bergantung pada dana yang didapatkan dari pemerintah pusat.
- d. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan berbagai fasilitas yang memadai bagi masyarakat daerah dengan memaksimalkan alokasi belanja modal. Hal ini diharapkan agar sarana dan prasarana yang ada tidak hanya terpusat pada kota-kota besar saja, sehingga meskipun pada kabupaten sekalipun tetap memiliki ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Sehingga persebaran penduduk tidak hanya memusat pada kota-kota saja, tetapi dapat didorong untuk memaksimalkan persebaran yang merata ke wilayah yang masih belum merata pada kabupaten yang ada.

2. Teruntut Peneliti Selanjutnya

1. Agar gambaran hasil yang didapatkan lebih teruji, maka penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat menggunakan jangka waktu yang lebih panjang, misalnya dengan menambah jangka waktu atau periode seperti sepuluh sampai lima belas tahun, untuk memperoleh sampel yang lebih luas.
2. Karena belanja modal merupakan belanja yang juga dapat dipengaruhi tidak hanya oleh variabel dalam penelitian ini saja, peneliti berikutnya disarankan untuk dapat menyertakan variabel independen tambahan untuk mengamati bagaimana variabel tersebut mempengaruhi alokasi belanja modal.

